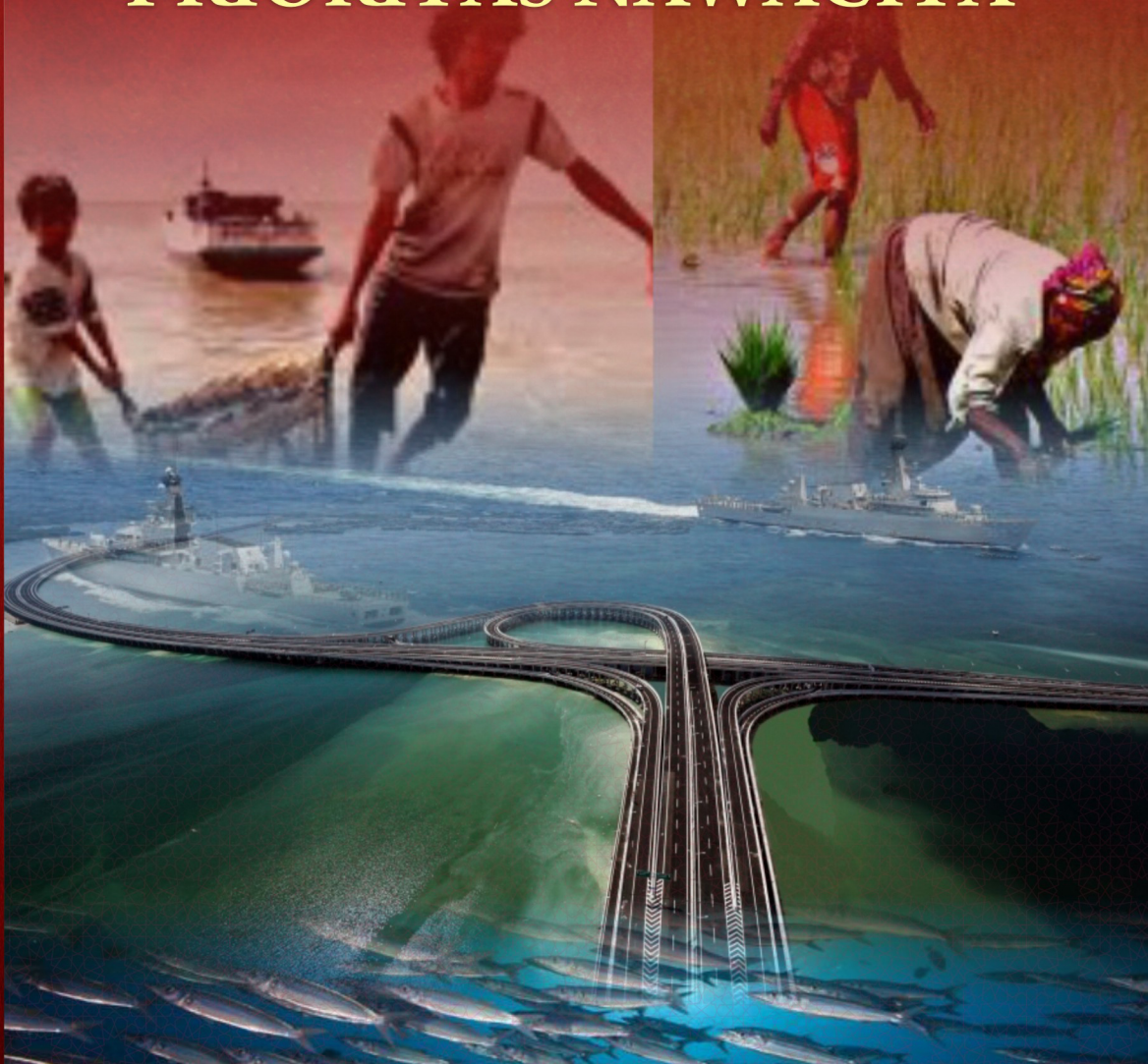


Editor:
Asep Ahmad Saefuloh

MEWUJUDKAN AGENDA PRIORITAS NAWACITA



Editor:
Asep Ahmad Saefuloh

MEWUJUDKAN AGENDA PRIORITAS NAWACITA



Diterbitkan oleh:
P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika
2015



Judul:

Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

xiii+237 hlm.; 15.5x23 cm

ISBN: 978-602-1247-38-9

Cetakan Pertama, 2015

Editor:

Asep Ahmad Saefuloh

Penulis:

Dewi Wuryandani

Lukman Adam

Rasbin

Sony Hendra Permana

Nidya Waras Sayekti

Lisnawati

Mohammad Teja

Izzaty

Sulis Wurini

Desain Sampul:

Abue

Tata Letak:

Zaki

Penyelia Aksara:

Helmi Yusuf

Diterbitkan oleh:

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)

Sekretariat Jenderal DPR RI

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bersama:

Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012

Kantor Pusat:

Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta

Telp. +62 274-6882748

Perwakilan Jabodetabek:

Perum Wismamas Blok E1 No. 43-44, Cinangka, Sawangan, Kota Depok

Telp. (021) 7417244

Sanksi Pelanggaran Pasal 72**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA PENGANTAR

KEPALA PUSAT PENGKAJIAN, PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI (P3DI) SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pada masa kampanye pemilihan presiden Republik Indonesia di Tahun 2014, pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo dan Yusuf Kalla mengusung 9 agenda prioritas yang disebut NAWACITA. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Buku dengan judul “Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita” hadir setelah satu tahun terpilihnya Joko Widodo dan Yusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Terbitnya buku ini mengingatkan kita kembali bahwa masih banyak agenda prioritas yang belum tercapai semenjak pemerintahan baru mulai berjalan. Saya menilai buku ini sangat menarik khususnya yang terkait upaya dalam mencapai kemandirian di bidang ekonomi dan perlindungan sosial.

Bahasan dalam buku ini cukup padat dengan berbagai permasalahan baik di bidang ekonomi maupun sosial. Dalam bidang ekonomi, buku ini membahas bagaimana peningkatan produktivitas dan daya saing melalui sektor UMKM dan pangan lokal, pengembangan kemandirian di sektor pertanian, perikanan dan keuangan. Dalam bidang sosial, banyak diulas bagaimana upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya pekerja anak dan nelayan yang miskin. Bahasan yang juga sangat menarik dalam buku ini adalah penggambaran bagaimana perilaku ketaatan aparatur pemerintahan.

Pada setiap tulisan, diuraikan secara jelas berbagai permasalahan pada setiap agenda prioritas pemerintah, serta upaya-upaya yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan

Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita

adanya terwujudnya kesembilan agenda prioritas dalam Nawacita diharapkan mampu memberikan kematangan politik, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan kepribadian yang berbudi luhur bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan selamat kepada para peneliti yang dengan tekun dan inovatif telah menghasilkan karya tulis ilmiah (KTI) yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman dan perumusan strategi dan kebijakan persaingan usaha dan mendorong daya saing Indonesia. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dr. Asep Ahmad Saefuloh yang telah mencurahkan pikiran dan waktunya dalam merancang tema, *outline* KTI, dan kegiatan editorial lainnya, sehingga buku ini layak untuk diterbitkan. Semoga invensi dan inovasi yang tersaji dalam buku ini bermanfaat bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat dan peningkatan daya saing Indonesia. Amin.

Jakarta, 16 Oktober 2015
Kepala Pusat Pengkajian,
Pengolahan Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal DPR RI

Dr. Rahayu Setya Wardani
NIP. 19600211 198703 2 002

PROLOG

Salah satu cita-cita bangsa adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai cita-cita tersebut pemerintahan saat ini telah mencanangkan 9 agenda prioritas yang disebut NAWACITA. Kesembilan agenda tersebut meliputi menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; melakukan revolusi karakter bangsa; dan mempertahankan kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam konteks untuk kemandirian dan kedaulatan, salah satu sektor strategis adalah sektor pertanian, karena terkait dengan kebutuhan primer dan sekunder. Industri pangan mempunyai potensi peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan baik ketersediaan, akses, maupun kualitas konsumsi pangan. Selain itu pengembangan terhadap bibit/ benih menjadi prioritas yang harus dilakukan agar produktivitas pertanian meningkat. Tidak hanya itu, pengembangan industri pangan dengan kemampuannya mengelola kegiatan pengembangan produk pangan yang efektif, juga sekaligus berpotensi untuk meningkatkan daya saing produk pangan Indonesia. Sektor strategis lainnya yang perlu dikembangkan dalam rangka kemandirian dan kedaulatan bangsa adalah sektor keuangan, khususnya perbankan. Untuk mewujudkan kedaulatan keuangan nasional salah satunya dengan melakukan penggabungan bank.

Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita

Penggabungan bank dapat menciptakan permodalan perbankan yang jauh lebih besar, perbankan lebih fokus dalam menggarap segmen pasar dan memicu pembangunan infrastruktur keuangan Indonesia.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, UMKM merupakan salah satu sektor yang harus dikembangkan. Pemberdayaan dan pengembangan UMKM harus dengan dimensi yang cukup luas dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Pemberdayaan juga perlu menyasar kepada pekerja anak, dimana kemiskinan dianggap sebagai faktor utama yang menyebabkan munculnya pekerja anak. Oleh karena itu, pemerintah telah menyusun *Roadmap Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022* yang berisikan visi, misi, strategi, dan langkah aksi dalam usaha penghapusan pekerja anak. Tidak kalah pentingnya, pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan, dimana nelayan Indonesia masih banyak yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketidakberdayaan nelayan dalam memperoleh BBM, teknologi maupun akses pasar menjadi kendala terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan. Selain pemberdayaan, pendampingan terhadap kegiatan pemberdayaan itu sendiri harus dilakukan secara berkelanjutan hingga nelayan mampu mandiri dan menaikkan tingkat kesejahteraan mereka.

Untuk menggapai tujuan dalam membangun kemandirian dan kedaulatan serta pemberdayaan kepada masyarakat, dibutuhkan adanya infrastruktur pendukung lainnya. Infrastruktur yang dibutuhkan selain fisik, juga non fisik. Salah satu contoh infrastruktur fisik yang dibutuhkan saat ini adalah tersedianya pelabuhan yang baik untuk mencapai program pengembangan poros maritim (tol laut) yang akan mendorong pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Sementara itu infrastruktur pendukung non fisik adalah tersedianya aparatur negara yang profesional.

Pemahaman yang komprehensif dan integratif pada tiga dimensi yang ingin dicapai, yakni kemandirian dan kedaulatan, pemberdayaan masyarakat, serta tersedianya infrastruktur pendukung yang baik diharapkan dapat dirumuskan perspektif kebijakan yang holistik dan integratif dalam mencapai agenda prioritas Nawacita di masa yang akan datang.

Jakarta, 1 November 2015
Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KEPALA P3DI	iii
PROLOG.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii

BAGIAN PERTAMA

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK PANGAN LOKAL

<i>oleh: Dewi Wuryandani.....</i>	<i>1</i>
I. Pendahuluan	2
II. Perkembangan Produk Pangan di Indonesia.....	6
III. Permasalahan Seputar Produk Pangan	7
IV. Penutup	17
Daftar Pustaka	19

BAGIAN KEDUA

KEMANDIRIAN SEKTOR PERTANIAN MELALUI PENGEMBANGAN BENIH PERTANIAN

<i>oleh: Lukman Adam.....</i>	<i>23</i>
I. Pendahuluan	24
II. Tinjauan Pustaka.....	28
III. Pemetaan Permasalahan Perbenihan Nasional	31
IV. Dukungan Kebijakan.....	38
V. Penutup	46
Daftar Pustaka	47

Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita

BAGIAN KETIGA

**MENCIPTAKAN KEDAULATAN KEUANGAN NASIONAL
MELALUI PENGGABUNGAN BANK:
SUATU TINJAUAN LITERATUR**

<i>oleh: Rasbin</i>	51
I. Pendahuluan	52
II. Kedaulatan Keuangan Nasional dan Penggabungan Bank.....	55
III. Implikasi Penggabungan Bank	63
IV. Penutup	68
Daftar Pustaka.....	69

BAGIAN KEEMPAT

**PENINGKATAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN
DAYA SAING BANGSA:
PENGEMBANGAN DI SEKTOR UMKM**

<i>oleh: Sony Hendra Permana</i>	73
I. Pendahuluan	74
II. UMKM dan Perkembangannya di Indonesia	76
III. Permasalahan yang Dihadapi UMKM	80
IV. Strategi Pengembangan UMKM	85
V. Penutup	90
Daftar Pustaka.....	92

BAGIAN KELIMA

**ZONA BEBAS PEKERJA ANAK SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA**

<i>oleh: Nidya Waras Sayekti</i>	95
I. Pendahuluan	96
II. Pengertian dan Keberadaan Pekerja Anak.....	98
III. Perkembangan dan Faktor Penyebab Pekerja Anak	100
IV. Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022	107
V. Penutup	111
Daftar Pustaka.....	113

BAGIAN KEENAM

**PEMBANGUNAN SEKTOR PERIKANAN LAUT
DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN**

<i>oleh: Lisnawati</i>	115
I. Pendahuluan	116
II. Permasalahan Perikanan di Indonesia	120
III. Potensi Perikanan Indonesia dan Potensi Kerugian Akibat IUU <i>Fishing</i>	125
IV. Faktor Ketidakberdayaan Nelayan Lokal dalam Memanfaatkan Hasil Laut.....	129
V. Kondisi Infrastruktur Laut Indonesia	132
VI. Penutup	135
Daftar Pustaka	136

BAGIAN KETUJUH

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN MISKIN
DI PESISIR PANTAI**

<i>oleh: Mohammad Teja</i>	139
I. Pendahuluan	140
II. Nelayan Miskin: Kecil dan Tradisional	143
III. Kondisi Nelayan Miskin di Indonesia	145
IV. Nelayan Miskin, Bertahan Hidup dalam Kekurangan.....	151
V. Perlindungan dan Pemberdayaan, Peningkatan Kualitas Hidup Nelayan.....	153
VI. Penutup	159
Daftar Pustaka	161

BAGIAN KEDELAPAN

**ANALISIS KEBIJAKAN UNGGULAN TOL LAUT
PEMERINTAH JOKOWI**

<i>oleh: Izzaty</i>	163
I. Pendahuluan	164
II. Konsepsi Pemikiran dalam Konsep Tol Laut	168
III. Gambaran Kebijakan Tol Laut di Indonesia	175
IV. Peran Pelabuhan dalam Pengembangan Tol Laut	180
V. Peran <i>Short Sea Shipping</i> (SSS) dalam Pengembangan Tol Laut.....	185

Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita

VI. Pembelajaran dari Kegagalan Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Kasus: Cimalaya sebagai Alternatif Pelabuhan Tanjung Priok	186
VII. Penutup	188
Daftar Pustaka	191

BAGIAN KESEMBILAN

MEMBENTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

YANG TAAT TERHADAP WAKTU KERJA MELALUI

TUNJANGAN KINERJA

(STUDI KASUS DI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI)

<i>oleh: Sulis Winurini</i>	195
I. Pendahuluan	196
II. Mendefinisikan Perilaku Ketaatan Terhadap Waktu Kerja	203
III. Membentuk Perilaku Ketaatan terhadap Waktu Kerja di Setjen DPR RI melalui Pemberian Tunjangan Kinerja	204
IV. Penutup	216
Daftar Pustaka	218
EPILOG	221
INDEKS	227
BIOGRAFI PENULIS	231
BIOGRAFI EDITOR	236

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perkembangan Anggaran Subsidi Benih dan Subsidi Lainnya di Indonesia Tahun 2008-2014 (Triliun Rupiah).....	34
Tabel 2.	Dukungan Kebijakan Perbenihan Nasional	39
Tabel 1.	Kriteria UMKM	78
Tabel 2.	Perkembangan UMKM dan Usaha Besar Tahun 2011-2013	79
Tabel 3.	Perbandingan Kinerja Sejumlah Indikator Daya Saing	84
Tabel 1.	Pekerja Anak Menurut Jenis Kegiatan dan Tempat Tinggal Tahun 2009-2010 (Agustus)	102
Tabel 2.	Jumlah Pekerja Anak Usia 7-15 Tahun Berbasis Data Terpadu TNP2K.....	102
Tabel 3.	Pekerja Anak Menurut Upah dan Jenis Kelamin Tahun 2009-2010(Agustus)	104
Tabel 1.	Potensi Perikanan Tangkap di Perairan Indonesia	118
Tabel 2.	Produksi Perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai	128
Tabel 3.	Kriteria Pelabuhan Perikanan di Indonesia.....	133
Tabel 4.	Jumlah Kelas Pelabuhan Perikanan di Indonesia	134
Tabel 1.	Rata-rata Biaya Pengirimman.....	167
Tabel 2.	Perbedaan Konsep MP3EI dengan Konsep Tol Laut.....	170
Tabel 1.	Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan.....	206
Tabel 2.	Pengurangan Tunjangan Kinerja Berdasarkan Pelanggaran terhadap Waktu Kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI	207

Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita

Tabel 3. Jumlah Kekurangan Jam Kerja PNS
di Salah Satu Bagian di Setjen DPR RI
Bulan Januari, Februari, Maret 2014 211

Tabel 4. Jumlah Kekurangan Jam Kerja PNS Setjen DPR RI
di Salah Satu Bagian di Bulan Juli,
Agustus, September 2014..... 212

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Alur Mekanisme Penganggaran dan Pembayaran Subsidi Benih.....	41
Gambar 2.	Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Subsidi Benih.....	45
Gambar 1.	Peta Pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan di Indonesia	125
Gambar 2.	Peta Jumlah Kapal yang Mencari Ikan di Indonesia Sebelum Moratorium	128
Gambar 3.	Peta Jumlah Kapal yang Mencari Ikan di Indonesia Setelah Moratorium	128
Gambar 1.	Skema Jalur Laut Utama.....	167

EPILOG

Buku dengan judul “Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita” mencakup tiga dimensi utama yaitu: (a) Kemandirian dan Kedaulatan bangsa; (b) Pemberdayaan Masyarakat; dan (c) Pengembangan Infrastruktur Pendukung. Menurut Dewi Wuryandari, Nawacita atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Pada pengembangan industri pangan mempunyai potensi peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan baik ketersediaan, akses, maupun kualitas konsumsi pangan. Tidak hanya itu, pengembangan industri pangan dengan kemampuannya mengelola kegiatan pengembangan produk pangan yang efektif, juga sekaligus berpotensi untuk meningkatkan daya saing produk pangan Indonesia. Untuk dapat memperkuat ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat maka kebijakan pembangunan industri pangan dapat diarahkan pada upaya industri aneka ragam pangan berbasis pada sumber daya lokal.

Lukman Adam berpendapat, sebagai input utama sektor pertanian, benih juga harus menjadi perhatian utama bagi pembuat kebijakan di sektor pertanian. Pengembangan benih pertanian sejalan dengan Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo-JK nomor 7 yang berbunyi mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Salah satu sektor strategis adalah sektor pertanian, karena terkait dengan kebutuhan primer dan sekunder. Pengembangan sektor pertanian sangat

Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita

dipengaruhi oleh bibit/benih, pupuk dan alat mesin pertanian sebagai sarana produksi utama. Bibit/benih yang diperoleh petani sebagai cikal bakal tanaman banyak diimpor dari negara maju atau perusahaan internasional. Petani mempunyai kecenderungan untuk menghasilkan benih/bibit yang berkualitas dan berdaya saing, namun kurangnya dukungan negara dalam bentuk regulasi dan anggaran membuat bibit yang dihasilkan petani menjadi *mandeg*, hanya digunakan untuk kebutuhan sendiri. Untuk mengatasi permasalahan benih nasional, maka diperlukan sejumlah kebijakan berupa revisi terhadap UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, penyederhanaan mekanisme penyaluran benih, melakukan koordinasi melalui pertemuan berkala dengan pembuat kebijakan mengenai benih tanaman, dan memperkuat peran Badan Benih Nasional.

Liberalisasi pasar keuangan negara-negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) akan diberlakukan secara penuh pada tahun 2020. Liberalisasi pasar keuangan ASEAN tentunya akan membawa manfaat bagi pesertanya tapi tidak sedikit pula kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkannya. Rasbin mengungkapkan bahwa, salah satu cara agar Indonesia siap dalam menghadapi liberalisasi pasar keuangan tersebut adalah dengan mewujudkan kedaulatan keuangan nasional dengan melakukan penggabungan bank. Penggabungan bank dapat dilakukan melalui *merger*, akuisisi atau konsolidasi tergantung tujuan dan kebutuhan bangsa di masa depan. Penggabungan bank dapat menciptakan permodalan perbankan yang jauh lebih besar, perbankan lebih fokus dalam menggarap segmen pasar dan memicu pembangunan infrastruktur keuangan Indonesia. Jadi, penggabungan bank di Indonesia dimaksudkan agar perbankan Indonesia betul-betul siap menghadapi liberalisasi keuangan internasional terutama liberalisasi pasar keuangan ASEAN.

Pembahasan lebih lanjut yang memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat, khususnya kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dilakukan oleh Sony Hendra Permana. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang strategis dan dapat dijadikan andalan untuk menopang perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2012 sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 96,99 persen serta berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap pembentukan produk domestik bruto Indonesia. Meskipun UMKM memiliki peran yang strategis, namun UMKM juga mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM umumnya terutama menyangkut aspek keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif (kesulitan akses modal, bahan baku, pemasaran dan daya saing), rendahnya kualitas SDM, rendahnya produktivitas, dan rendahnya daya saing. Untuk itu dibutuhkan suatu dukungan dari pemerintah agar UMKM dapat lebih berkembang dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut pasar bebas *Asean Community*. Pemberdayaan dan pengembangan UMKM harus dengan dimensi yang cukup luas dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah.

Pekerja anak merupakan isu global yang diagendakan untuk ditanggulangi secara menyeluruh dan berkesinambungan. Komitmen ini dinyatakan dalam bentuk cita-cita bersama "Indonesia bebas pekerja anak" pada tahun 2022. Nidya Waras Sayekti mengungkapkan bahwa kemiskinan dianggap sebagai faktor utama yang menyebabkan munculnya pekerja anak. Faktor lainnya adalah faktor kultural, sosial-ekonomi keluarga, lemahnya perangkat hukum, pengawasan dan pelaksanaannya, permintaan (*demand*), menurunnya tingkat pendapatan pada sektor ekonomi/wilayah tertentu, relokasi industri, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan faktor lingkungan merupakan penyebab khususnya pada kasus-kasus pekerja anak di sektor pertanian. Upaya penanggulangan masalah pekerja anak merupakan masalah yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah telah menyusun *Roadmap Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022* yang berisikan visi, misi, strategi, dan langkah aksi dalam usaha penghapusan pekerja anak. Namun tidak ada satu kebijakan pun yang dengan sendirinya dapat mengakhiri bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Oleh karena itu, aksi yang dilakukan secara terus menerus dapat memberi peluang perubahan pada fenomena pekerjaan terburuk untuk anak. Aksi-aksi yang dapat dilakukan, antara lain adalah pelaksanaan dan penegakan hukum yang benar, penyediaan aksesibilitas layanan publik yang

Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita

memadai (meliputi pendidikan wajib yang gratis dan berkualitas, serta pelayanan perlindungan sosial yang nondiskriminatif), dan mengembalikan fungsi pasar tenaga kerja yang sesuai.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat nelayan, Lisnawati mengungkapkan bahwa potensi hasil laut Indonesia masih 20 persen yang termanfaatkan, 80 persennya belum terjamah (*slepping potency*). Produksi perikanan tangkap pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 7,11 persen atau sekitar Rp.109 triliun dibanding tahun 2013. Kebijakan pemerintah dalam melakukan moratorium perizinan membuat sektor perikanan kini tumbuh 8,4 persen, naik hampir 40 persen dari tahun sebelum diberlakukan moratorium. Moratorium juga membuat produksi ikan lokal naik 240 persen. Dengan naiknya produksi ikan lokal tidak serta merta membuat kesejahteraan nelayan meningkat. Ketidakterdayaan nelayan dalam memperoleh BBM, teknologi maupun akses pasar menjadi kendala terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan. Hal ini dapat membuat harga ikan di pasaran tidak turun meskipun ikan saat ini telah melimpah. Pemerintah perlu menyediakan sarana akses BBM bagi nelayan, melakukan edukasi teknologi penangkapan ikan bagi nelayan dengan penguatkan SDM para nelayan maka nelayan lokal tidak akan tergencet kemajuan teknologi berikut budaya nelayan asing. Pemerintah perlu pula membangun sarana pengolahan eksploitasi hasil laut, serta membangun infrastruktur laut yang terintegrasi agar Nawa Cita Presiden dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Masih dalam rangka pemberdayaan terhadap Nelayan, Mohammad Teja mengungkapkan bahwa nelayan Indonesia masih banyak yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil tangkapan ikan yang didapat oleh nelayan jauh dari harapan dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya bersama keluarga. Keterbatasan sarana tangkap tentunya menjadi persoalan utama nelayan. Pemberdayaan nelayan tentunya menjadi alternatif utama selain modal usaha yang diberikan oleh pemerintah. Tidak hanya itu, kekuatan hukum yang dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi nelayan tentunya menjadi penting untuk memberikan kesempatan seluasnya bagi nelayan miskin untuk mengembangkan dan meningkatkan kehidupan ekonominya. Tulisan ini juga mencoba menggali bagaimana penyebab kemiskinan

nelayan dan bagaimana mereka bisa bertahan hidup dalam kekurangan tersebut, dan bentuk pemberdayaan bagi nelayan untuk meningkatkan kesejahteraannya, selain pemberdayaan, pendampingan terhadap kegiatan pemberdayaan itu sendiri harus dilakukan secara berkelanjutan hingga nelayan mampu mandiri dan menaikkan tingkat kesejahteraan mereka. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sumber-sumber data sekunder, hasil-hasil penelitian mengenai nelayan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan kemudian dianalisa.

Pembahasan lebih lanjut mengenai infrastruktur pendukung dilakukan oleh Izzaty. Analisis kebijakan unggulan tol laut pemerintah Jokowi mencakup gambaran kebijakan tol laut di Indonesia, peran pelabuhan dan *Short Sea Shipping* (SSS) dalam pengembangan tol laut, dan pembelajaran dari kegagalan perencanaan pembangunan pelabuhan Tanjung Priok. Pengembangan poros maritim (tol laut) dalam transportasi laut akan mendorong pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Tantangan dari pembangunan tol laut adalah efisiensi pelabuhan yang berdampak pada penurunan biaya logistik. Implementasi tol laut akan menunjukkan keberhasilan apabila dibarengi dengan adanya integrasi antar moda, kawasan industri yang terintegrasi antara industri dengan infrastruktur pendukung, serta pembiayaan tol laut yang memadai. Faktor penting lainnya yang menunjang kebijakan tol laut adalah perlu adanya kesetaraan produksi dan kebutuhan barang di berbagai wilayah di Indonesia, terutama wilayah timur Indonesia. Pembangunan poros maritim dan tol laut perlu dilakukan secara konsisten sebagai modal pembangunan dan kekuatan nasional untuk membangun ekonomi maritim.

Salah satu infrastruktur pendukung dalam pembangunan Indonesia kedepan adalah tersedianya aparatur negara yang profesional. Sulis Winurini mengungkapkan pemberian tunjangan kinerja dalam era Reformasi Birokrasi menjadi strategi pemerintah untuk mengatasi permasalahan kinerja pegawai pemerintahan yang salah satunya mengenai disiplin kehadiran kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja dan mengevaluasi efeknya terhadap perilaku ketaatan pegawai terhadap waktu kerja. Studi kasus Setjen DPR

Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita

RI. Teori yang akan digunakan sebagai acuan analisa dan evaluasi adalah Teori Perilaku Operan Skinner. Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi, penggunaan tunjangan kinerja sebagai stimulus penguat memiliki dampak. Setelah konsekuensi pengurangan tunjangan kinerja diberlakukan, semakin sedikit pegawai yang mengalami keterlambatan datang dan/atau kecepatan pulang kerja. Di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu dibenahi. *Pertama*, ketidakjelasan batasan antara respon yang diharapkan dengan yang tidak diharapkan. *Kedua*, adanya kemungkinan dimana respon pegawai hanya terfokus pada jam kedatangan dan kepulangan kerja.

Jakarta, 16 Oktober 2015

Editor

INDEKS

A

Aktiva, 62, 77
Akuisisi, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 64,
65, 66, 67, 68
Akuisisi Aset, 60
Akuisisi Finansial, 61
Akuisisi Horizontal, 61
Akuisisi Konglomerat, 61
Akuisisi Saham, 60
Akuisisi Strategis, 61
Akuisisi Vertikal, 61
Alat mesin pertanian, 27
Alat tangkap, 127, 140, 141, 143,
145, 146, 147, 154
Alokasi Modal, 52
Areal tanaman, 32, 46
Arsitektur Perbankan Indonesia, 66
ASEAN, 4, 5, 10, 16, 52, 53, 54, 84

B

Badan Benih Nasional, 24, 36, 46
Badan Pusat Statistik, 77, 96, 99
Badan Usaha, 57, 58, 77, 90, 91, 158,
190
Bahan Baku, 12, 17, 59, 76, 80, 81,
91, 126
Bank Indonesia, 4, 52, 57, 65, 89
Bank Nasional, 53, 54, 55, 67
Benih bantuan, 33, 46
Benih bersertifikat, 32, 37, 38, 46
Benih unggul, 24, 28, 29, 31, 33, 35,
37, 44

Benih, 2, 8, 9, 11, 12, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46
Biaya, 5, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 44,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 84, 85, 86,
129, 130, 131, 148, 149, 155,
164, 165, 167, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 181,
183, 185, 188, 189, 190
Bibit/Benih, 27
Bisnis, 15, 56, 58, 61, 62, 63, 83, 87,
89, 90, 121, 172, 180, 186, 190
BUMN, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 42,
43, 44, 46, 172, 174, 186, 187,
190

D

Daya saing, 1, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 53,
56, 57, 73, 75, 84, 85, 86, 87, 88,
91, 175, 180, 187
Deposito, 64, 65
Dinas Pertanian, 32, 33, 34, 42, 43,
44, 46
Distribusi, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
18, 28, 42, 45, 61, 62, 126, 146,
147, 164, 165, 169, 170, 172,
174, 176, 183, 184
Diversifikasi, 12, 15, 16, 63, 83, 144
Dukungan kebijakan, 8, 25, 28, 38,
39

Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita

E

Efisiensi, 45, 52, 53, 57, 62, 64, 65,
66, 67, 123, 125, 168, 175, 176,
188, 189, 190, 206

Esensial, 24

H

Hilir, 10, 26, 28, 59, 61

Hortikultura, 24, 28, 39

I

Indonesia, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 33, 34,
45, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 64,
68, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84,
85, 86, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 104, 105, 106, 107,
109, 110, 111, 116, 117, 118,
119, 120, 125, 126, 127, 128,
131, 132, 133, 134, 135, 140,
142, 145, 151, 164, 165, 166,
167, 169, 170, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 188, 189,
198, 200, 201, 204

Industri hulu, 26

Industri Perbankan, 53, 65, 66

Infrastruktur, 5, 12, 29, 53, 85, 131,
132, 135, 141, 145, 148, 164,
165, 166, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 175, 176, 178, 179,
180, 181, 184, 185, 187, 188,
189

Inovasi, 6, 17, 25

Input, 5, 24, 26, 28, 45, 123, 178

Insentif, 15, 29, 63, 87, 124, 178

Investasi, 6, 52, 57, 80, 85, 121, 122,
123, 144, 164, 165, 171, 174,
175, 177, 178, 179, 180, 182

K

Kedaulatan, 2, 8, 9, 12, 13, 14, 51,
52, 53, 55, 68, 74, 117, 166, 169

Keluarga, 12, 63, 83, 96, 99, 100,
101, 104, 106, 111, 140, 141,
144, 150, 151, 152, 153, 155,
156, 160, 205

Kemandirian ekonomi, 13, 27, 55,
75, 119

Kemiskinan, 76, 85, 99, 102, 105,
106, 109, 124, 141, 142, 144,
145, 146, 147, 148, 151, 153

Kerusakan lingkungan, 142, 159

Kesepakatan internasional, 26

Ketahanan pangan, 3, 4, 5, 6, 7, 11,
13, 14, 15, 17, 18, 26, 30

Kuangan Nasional, 51, 52, 53, 55,
68

Konektivitas, 164, 166, 167, 168,
169, 170, 173, 176, 180, 183,
184, 188

Konglomerat, 58, 59, 61

Konsolidasi, 53, 54, 56, 61, 62, 66,
67, 68, 74

Koordinasi, 18, 32, 33, 43, 46, 86,
91, 109, 110, 174, 187, 190

Koperasi, 4, 55, 77, 79, 87, 88, 89,
90, 91, 147, 148

Kreditur, 60, 64

L

Lahan, 2, 6, 9, 11, 12, 15, 17, 24, 31,
133, 158, 187

Lembaga Keuangan, 52, 85, 105

Liberalisasi Keuangan, 52, 68

Likuiditas, 26, 64

Logistik, 12, 85, 164, 165, 166, 168,
169, 171, 173, 175, 176, 178,
180, 181, 183, 184, 185, 187,
188, 189, 190

M

Maritim, 74, 116, 117, 118, 132, 141, 165, 166, 167, 168, 188, 170, 175, 176, 177, 180, 184, 188
Market Power, 64, 65
Merger, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
Merger Horizontal, 58
Merger Perusahaan, 59
Merger Saham, 59
Merger Vertikal, 58
Merger Yuridis, 59
Modal, 5, 38, 52, 53, 55, 57, 60, 63, 77, 80, 82, 85, 91, 124, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 150, 151, 153, 154, 158, 174, 178
Modernisasi, 25
Monopoli, 66, 87, 147

N

Nawa Cita, 13, 14, 27, 75, 116, 135, 200
Nelayan kecil, 128, 130, 131, 141, 150, 151, 153, 156, 157, 158, 159
Nelayan miskin, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 159
Nelayan tradisional, 120, 124, 131, 135, 140, 141, 143, 146, 150, 159

O

Overfishing, 120, 121, 122, 123, 142

P

Pajak, 35, 57, 62, 63
Pelabuhan, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 148, 154, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,

173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
Pemasaran, 5, 28, 36, 37, 62, 80, 82, 84, 90, 91, 120, 132, 133, 141, 144, 147, 148, 158, 176
Pembentukan perilaku, 201, 202, 203, 207, 209, 214, 216, 217
Pemberdayaan, 3, 4, 34, 86, 88, 91, 111, 115, 139, 141, 142, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 188, 189
Pemerintah Daerah, 31, 39, 87, 88, 89, 141, 153, 158, 189
Pemerintah Pusat, 31, 86, 91, 111
Penangkapan ikan, 118, 119, 120, 121, 125, 126, 127, 128, 134, 135, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 153, 154
Pendampingan, 89, 155, 156, 158, 159
Pendapatan petani, 5, 25, 29
Penggabungan Bank, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 68
Pengkondisian operan, 201, 202, 203, 207, 209, 216
Perempuan, 102, 103, 106, 152, 160
Perilaku taat terhadap waktu kerja, 204, 207, 208, 209, 211, 213, 215, 216
Perkebunan, 2, 24, 28, 39
Pertanian, 4, 5, 10, 12, 24, 27, 31, 32, 39, 46, 104, 184, 186
Pertumbuhan Ekonomi, 52, 53, 54, 76, 85, 88, 144, 164, 172, 183, 184
Perusahaan, 9, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 46, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 77, 83, 86, 89, 125, 143, 158, 170, 175, 182

Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita

Pesisir, 116, 118, 120, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 153, 155, 156, 165, 178, 185
Petani, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 77, 106
Pinjaman, 64, 81, 89, 140, 158, 179
Produk, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 26, 29, 55, 56, 59, 63, 76, 82, 83, 89, 91, 141, 144, 147, 158, 176, 187
Produktivitas, 6, 8, 11, 13, 15, 25, 28, 29, 73, 75, 83, 84, 91, 123, 124, 144, 149, 172, 183, 188, 189, 196, 197
Produktivitas tanaman, 24
Profit, 64, 65, 66
Pupuk, 11, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35

R

RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), 33, 46
Realisasi, 26, 32, 35, 46, 173, 216

S

Saham, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 66
Savings, 66, 67
Sinergi, 61, 62, 63, 183
Skala Ekonomi, 64, 65, 67
Subsidi, 3, 15, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 122, 130, 154
Sumber Daya Manusia, 80, 82, 83, 84, 109, 111, 118, 140, 144, 155, 158, 196
sumber daya pesisir, 142, 146
Sumber Daya Produktif, 80, 91
Supply chain, 10, 11

T

Tanaman pangan, 24, 28, 32, 43, 44, 46
Teknologi, 3, 5, 6, 15, 17, 24, 25, 31, 60, 63, 77, 80, 82, 83, 84, 87, 90, 106, 118, 131, 132, 135, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 150, 153, 156, 158, 184, 188, 189
Tengkulak, 142, 149, 150
tol laut, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 187, 189, 190, 191
Transfer Teknologi, 63
Tunjangan kinerja, 195, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 200, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217

U

UMKM, 2, 55, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, 39, 46
UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, 46

V

varietas unggul, 24, 25, 28

W

warna label, 37, 46

BIOGRAFI PENULIS



DEWI WURYANDANI

Penulis menyelesaikan studi S1 pada jurusan Teknik Kimia – Fakultas Teknologi Industri di Universitas UPN “Veteran” Yogyakarta dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada jurusan Keuangan Manajemen Ekonomi-Magister Ekonomi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Beberapa topik penelitian tentang ekonomi dan kebijakan publik telah dilakukan penulis seperti: Pembangunan Daerah Tertinggal (2011), Sistem dan Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2011), Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Volume Perdagangan Non Migas (2012), Industri Kreatif (2012), Kawasan Pariwisata Khusus (2013), Membangun Iklim Investasi dalam Menggerakkan UMKM (2013) serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Otonomi Baru (2014). Dan Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Perdagangan (2015). Penulis dapat dihubungi melalui email: dewi.wuryandani@gmail.com.



LUKMAN ADAM

Penulis adalah Peneliti Muda bidang ekonomi dan kebijakan publik di P3DI Setjen DPR. Menyelesaikan studi S1 dan S2 di Institut Pertanian Bogor. Kepakarannya adalah ilmu kebijakan. Topik penelitian yang telah dilakukan penulis adalah kelautan (2011), pesisir (2012), energi baru terbarukan (2013), karantina hewan, ikan, dan tumbuhan (2014), dan fasilitasi perdagangan

Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita

(2015). Mulai tahun 2010 sampai saat ini, penulis terlibat aktif dalam pembahasan RUU yang terkait dengan pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan. Penulis dapat dihubungi di mada.kenn@gmail.com.



RASBIN

Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Pertanian Bogor Jurusan Teknologi Industri Pertanian pada tahun 2005. Gelar Magister Sains Ekonomi diperoleh dari Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia dengan kekhususan Ekonomi Moneter dan Perbankan pada tahun 2008. Penulis pernah terlibat dalam beberapa proyek penelitian di lingkungan Universitas Indonesia sebagai asisten peneliti dan *research fellow* di Direktorat Internasional Bank Indonesia. Penulis juga aktif sebagai asisten dosen di Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi dan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia juga sebagai dosen tidak tetap di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Saat ini Penulis merupakan peneliti muda bidang ekonomi dan kebijakan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Saat ini Penulis juga terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Adapun beberapa tulisan yang pernah dibuat oleh Penulis antara lain: Hubungan Kausal Dinamis Antarvariabel Makroekonomi di Indonesia dalam Kajian Krisis Ekonomi sebagai Kejutan Eksternal, Indikator Kualitas Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan Sektor Industri Dan Penyerapan Tenaga Kerja, Analisis *Shocks* Kebijakan Moneter dalam Perekonomian Terbuka: Kasus Dua Sektor Ekonomi di Indonesia, Ekspektasi Potensi *Underground Economy* di Indonesia, Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Loans* Sektor-sektor Ekonomi di Indonesia, *Factors Affecting The Community Welfare of Seven Expanded Provinces in Indonesia*, Strategi Antisipasi Efek Krisis Ekonomi terhadap Perekonomian Indonesia, Analisis Pengaruh Kredit Sektoral, Suku Bunga Kredit, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektoral di Indonesia tahun 2005–2010: Pendekatan Panel Data, Gejala Deindustrialisasi dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia, Lembaga Keuangan Mikro sebagai Upaya Peningkatan Peran Usaha Mikro Kecil dan

Menengah dalam Pembangunan Nasional, dan Subsidi dan Upaya Peningkatan Daya Saing Ekspor Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail: ras9bin@yahoo.co.id.



SONY HENDRA PERMANA

Penulis adalah Peneliti Muda bidang ekonomi dan kebijakan publik di P3DI Setjen DPR. Menyelesaikan studi S1 di Universitas Persada Indonesia YAI dan S2 di Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Kepakarannya adalah Ekonomi Terapan. Topik penelitian yang telah dilakukan penulis adalah pangan (2011), pembiayaan perumahan rakyat (2012), perimbangan keuangan pusat dan daerah (2013), persaingan usaha (2014), dan investasi daerah (2015). Mulai tahun 2011 sampai saat ini, penulis terlibat aktif dalam pembahasan RUU yang terkait dengan keuangan dan perbankan. Penulis dapat dihubungi di sony_hendra@yahoo.com.



NIDYA WARAS SAYEKTI

Penulis lahir di Jakarta 3 Juli 1978, menyelesaikan pendidikan D3 di Politeknik Universitas Indonesia Jurusan Perbankan, S1 di Universitas Mercu Buana Jurusan Manajemen, dan S2 Magister Manajemen di universitas yang sama. Penulis mulai berkarir sebagai Peneliti Muda Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI sejak tahun 2010 hingga sekarang. Penulis telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang dimuat dalam bentuk Info Singkat, Jurnal, dan Bagian Buku, antara lain: Kebijakan Utang Luar Negeri Indonesia Dari lembaga Keuangan Global (2015), RAPBN-P Tahun 2014 Minim Fungsi Stimulus (2014), Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan (2014), Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Provinsi Maluku Utara (2014), dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air: Peran PJT I dalam Menjaga Ketahanan Air dan Pangan di Provinsi Jawa Timur (2013). Penulis dapat dihubungi melalui email: nidya_ws@yahoo.com.

Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita



LISNAWATI

Penulis adalah Peneliti Muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan bidang konsentrasi Ekonomi Terapan. Lahir di Jakarta, 8 September 1982. Pendidikan S1 Sarjana Sains diselesaikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 2005. Pendidikan S2 diselesaikan di Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia pada Tahun 2008. Bekerja sebagai Peneliti bidang ekonomi dan kebijakan publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Saat ini terlibat aktif dalam penelitian di bidang ekonomi dan kebijakan publik diantaranya penelitian tentang Konektivitas. Penulis dapat dihubungi melalui email: lisnawati.dpr@gmail.com



MOHAMMAD TEJA

Penulis adalah peneliti Bidang Sosiologi pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI. Magister Sosiologi Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2002. Sarjana Hubungan Internasional Universitas Jayabaya tahun 2000. Ketertarikan penelitian seputar Isu Anak, Orang Cacat, Pluralitas, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Masyarakat Miskin, Interaksi Sosial dan Simbolis. Tulisan yang pernah diterbitkan antara lain berjudul: “Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Nusa Tenggara Timur Melalui Sektor Pariwisata” Dan “Hilangnya Hak Anak: Studi Kasus Konflik Ahmadiyah.” Email: mohammadteja_76@yahoo.co.id dan teja@dpr.go.id



IZZATY

Penulis lahir di Padang, 5 Desember 1977. Penulis adalah Peneliti pada Pusat Pengkajian pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Penulis memperoleh gelar sarjana Teknik di bidang Teknik Sipil pada tahun 2000 di Universitas Andalas Padang dan Master Ekonomi pada program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia pada tahun 2009. Jabatan penulis saat ini

Biografi Penulis

adalah Peneliti Muda. Hasil kajian dan tulisan yang telah dibuat oleh penulis antara lain: Permasalahan dalam Pengembangan Rumah Susun (2010), Daya Saing Ekspor Barang-Barang dari Karet (2010), Kebijakan Pengembangan Produksi Garam Nasional (2010), Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Jalan (2010), Pengelolaan Keuangan Desa: Tinjauan Kebijakan Alokasi Dana Desa (2011), Tata Kelola Keuangan Daerah (2011), Kebijakan CSR sebagai Strategi Pengurangan Pajak Pada BUMN(2012), Defisit Anggaran dan Kebijakan Penanggulangnya (2012), Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Indonesia (2013), Kinerja dan Prospek Pengembangan Industri Kreatif di Indonesia (2013), Upaya Stabilisasi Harga Daging Sapi (2013), APBN 2015 sebagai Tantangan Fiskal Pemerintahan Baru (2014), dan Strategi Mengatasi Penurunan Daya Beli di Tengah Perlambatan Ekonomi (2015). Penulis dapat dihubungi melalui email: izzatym@yahoo.com



SULIS WINURINI

Penulis adalah Peneliti P3DI Kesejahteraan Sosial dengan kepakaran Psikologi. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Psikologi di Universitas Indonesia pada tahun 2004. Kemudian ia melanjutkan S2 Profesi Psikologi Industri dan Organisasi di Universitas Indonesia pada tahun 2004 hingga tahun 2007. Ia bergabung di Setjen DPR RI sebagai Peneliti mulai tahun 2009. Penulis dapat dihubungi melalui email: suliswinnurini@yahoo.com.

BIOGRAFI EDITOR



Asep Ahmad Saefuloh, lahir di Tasikmalaya 11 September 1971, masuk sebagai peneliti Tim Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI tahun 1997. Jenjang jabatan fungsional saat ini adalah Peneliti Madya (IVc) bidang Kebijakan Publik. Latar belakang pendidikan adalah Sarjana Ilmu Ekonomi

dan Studi Pembangunan (IESP), Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surakarta/Sebelas Maret (UNS) dan lulus tahun 1996. Kemudian melanjutkan studi pada Program Magister Kajian Kependudukan dan Ekonomi Sumber Daya Manusia di Universitas Indonesia (UI) dan lulus tahun 2003. Terakhir, menyelesaikan Program S3 Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tahun 2012 dengan judul disertasi “Resistensi dalam Proses Perubahan Keorganisasian: Pengaruh Kepemimpinan, Partisipasi dan Sinisme terhadap Resistensi dalam Perubahan pada Pejabat Struktural Setjen DPR RI”.

Pendidikan non-formal yang telah diikuti antara lain *Profesional Grapho Analyst* di *Life Excellent Center* (LEC), *Workshop Grapho for Success* oleh LEC dan *Centre for Grapho Studies* (CGS), *Assessment Center Assessor Certification* di Pusat Pengembangan Manajemen (PPM), dan *Consulting Hypnotist* di *National Guild of Hypnotist* (NGH), Inc., New Hampshire di tahun 2013, serta *Master Hypnotherapist* dari *School of Mind Reprogramming* di tahun 2012. Selain itu, juga telah mengikuti berbagai pendidikan non-formal terkait sumber daya manusia, APBN, keparlemenan, dan bidang ekonomi lainnya. Beberapa buku, makalah, penelitian, bahan seminar telah yang telah ditulis dan dipublikasikan antara lain: Pengelolaan SDM

pada Organisasi Penunjang Parlemen: Teori, Emperik dan Agenda Kebijakan (Buku-2014), Kebijakan *Reserve Drain*: Mengapa Penting dan Alternatif Pendekatan (Jurnal-2012), Kebijakan APBN 2009 di Tengah Krisis (Makalah dalam Majalah Parlementaria – 2009), Pengelolaan Anggaran Dewan (suara Pembaruan – 2008), dsb.

MEWUJUDKAN AGENDA PRIORITAS NAWACITA

Buku dengan judul “Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita” hadir setelah satu tahun terpilihnya Joko Widodo dan Yusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Terbitnya buku ini mengingatkan kita kembali bahwa masih banyak agenda prioritas yang belum tercapai semenjak pemerintahan baru mulai berjalan. Saya menilai buku ini sangat menarik khususnya yang terkait upaya dalam mencapai kemandirian di bidang ekonomi dan perlindungan sosial.

Bahasan dalam buku ini cukup padat dengan berbagai permasalahan baik di bidang ekonomi maupun sosial. Dalam bidang ekonomi, buku ini membahas bagaimana peningkatan produktivitas dan daya saing melalui sektor UMKM dan pangan lokal, pengembangan kemandirian di sektor pertanian, perikanan dan keuangan. Dalam bidang sosial, banyak diulas bagaimana upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya pekerja anak dan nelayan yang miskin. Bahasan yang juga sangat menarik dalam buku ini adalah penggambaran bagaimana perilaku ketaatan aparatur pemerintahan.



Diterbitkan oleh :
P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika



ISBN 978-602-1247-38-9



9 786021 247389